

## BAB V : P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

-----

1. Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah diniyah yang didirikan pada 16 Rajab 1334 H atau 31 Januari 1926. Organisasi ini didirikan antara lain untuk memberikan jawaban yang konkret dari kalangan ulama dan santri terhadap situasi yang berkembang pada saat itu, termasuk juga masalah penjajahan Belanda.

Pada mulanya, organisasi berupa semacam panitia yang dibentuk untuk menghadapi kongres khilafat di Saudi Arabia. Panitia yang diberi nama "Komite Hijaz" itu direncanakan akan menghadap Raja Ibnu Saud yang dikenal sebagai penganut Wahabi, untuk menyampaikan berbagai keberatan dan usulan para ulama Ahlussunnah Waljamaah agar aliran itu juga tetap diperkenankan berkembang di Saudi Arabia.

Pembentukan Komite Hijaz itu dihadiri ulama-ulama terkemuka dari kalangan pesantren, antara lain KH Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang, KH Bisri Syamsuri dari Tambak Beras Jombang, Raden Asnawi dari Kudus, KH Ma'shum dari Lasem, KH Ridlwan dari Surabaya, Nawawi dari Pasuruan, dan sebagainya.

Rapat di Surabaya yang kemudian dijadikan sebagai tanggal lahirnya NU itu menghasilkan dua keputusan penting, yaitu meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz untuk mengirim delegasi ke Saudi Arabia, dan membentuk jam'iyah sebagai wadah persatuan para ulama yang tugasnya

memimpin umat menuju Izzul Islam Wal Muslimin. Jam'yah itu diberi nama "Nahdlatul Ulama".

2. Perkembangan dan pertumbuhan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia memang menarik diamati. NU setidaknya telah tiga kali berubah menjadi aktivis politik, yakni ketika ikut mendirikan dan menjadi pendukung utama Masyumi, kemudian berubah menjadi Partai Nahdlatul Ulama sampai akhirnya harus berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan.

Pada awalnya ketika NU bergabung dengan Masyumi, partai ini telah berhasil mencapai tingkat yang terhormat di peta politik Indonesia. Kebesaran Masyumi juga tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh NU seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wachid Hasyim, KH Wahab Chasbullah, dan sebagainya.

Akan tetapi, ketika organisasi ini sudah besar kemudian terjadi kekurangserasian antara kelompok ulama di satu sisi (tokoh NU) dengan kelompok intelektual yang berpendidikan Barat, terutama dalam persepsi politik. Kelompok intelektual menganggap ulama tidak pantas terjun ke gelanggang politik, termasuk juga menjabat menteri agama.

Perbedaan demi perbedaan akhirnya tidak bisa diredam. NU dalam muktamarnya di Palembang pada Mei 1952 secara resmi memutuskan keluar dari Partai Masyumi. Setelah itu, NU kemudian mencanangkan untuk menjadi partai yang berdiri sendiri dengan pertimbangan bahwa anggota NU yang jumlahnya

jutaan orang akan lebih menguntungkan kalau punya wadah politik sendiri. Dan, tekad itu akhirnya bisa dibuktikan, NU berhasil menjadi empat besar dalam Pemilu 1955. NU mengantongi suara hampir 7 juta dan menempati urutan ketiga di bawah Masyumi.

Pada Pemilu berikutnya, yakni tahun 1971, bahkan NU berhasil mendudukkan urutan II setelah Golongan Karya dengan mengantongi 58 kursi di lembaga legislatif. Sedangkan Parmusi hanya 24 kursi di DPR.

Pada tahun 1973, ketika pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menyederhanakan jumlah partai, NU harus berfusi dengan empat partai politik Islam, yakni PSII, Parmusi dan Perti, untuk mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. Setelah NU kembali ke khittah 1926, selain banyak aktivitas yang harus ditinggalkan, khususnya dalam kegiatan politik praktis, kini NU lebih ditantang untuk mengadakan berbagai perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya, termasuk juga penataan organisasi. Program-program yang akan digarap juga harus disesuaikan dengan bidang sosial keagamaan dan lebih praktis menyentuh kepentingan langsung anggotanya.

Kembalinya NU ke khittah juga diikuti dengan keputusan untuk keluar dari PPP yang sudah sekitar 10 tahun digelutinya. Rencana keluar dari PPP itu mulanya diputuskan dalam Munas Ulama NU di Situbondo, yang kemudian secara

resmi diputuskan dalam Muktamar NU XXVII di Situbondo.

Bersamaan dengan itu, NU juga mengambil keputusan untuk menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik, melarang pengurus harian NU merangkap jabatan di partai politik.

Salah satu keputusan penting lainnya yang cukup revolusioner bersamaan dengan kembalinya NU menjadi jam'iyah adalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

Pemasyarakatan khittah dan masalah-masalah ke-NU-an juga merupakan salah satu program penting yang digarap NU. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan latar belakang tentang keputusan kembali ke khittah dan berbagai masalah yang dihadapi NU, serta penggalangan persatuan dan kesatuan di kalangan jama'ah NU.

#### **B. SARAN - SARAN**

-----

Keputusan NU untuk kembali ke khittah 1926 dinilai banyak pihak sebagai keputusan yang mendasar dan sangat tepat, baik dari segi "timing", politis, maupun dari segi pengembangan NU jangka panjang.

Keputusan yang tepat dan baik itu masih harus dibarengi dengan berbagai langkah yang tepat dan baik pula, khususnya dalam bidang organisasi, manajemen, kaderisasi, orientasi, dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan di akhir skripsi ini;

1. Sebagai jam'iyah yang terbesar di Indonesia, sebaiknya NU juga bisa mendayagunakan jumlah anggota yang banyak itu yang lebih terarah dan terprogram.

2. Orientasi program NU sebaiknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang lebih praktis dan menyangkut kebutuhan rakyat banyak, baik dalam bidang pertanian, perikanan, ketrampilan, industri rumah tangga, dan sebagainya.

3. Kehadiran NU pada dekade 80-an ini, diakui atau tidak, memang lebih bisa dirasakan anggotanya saja daripada anggota masyarakat lain. Di masa mendatang, NU harus lebih memperluas jangkauannya dalam berbagai bidang --khususnya program yang mudah dicapai-- agar kehadirannya bisa lebih berarti dan eksistensinya lebih kokoh serta diakui oleh masyarakat.

4. Madrasah dan pondok pesantren yang selama ini menjadi basis NU, harus dibina kembali secara lebih terencana, terutama untuk menghadapi persaingan yang kian ketat. Jangan sampai ada madrasah atau pondok kehilangan murid dan santri.

5. Trauma politik yang menghantui NU harus bisa dihilangkan sampai ke akar-akarnya. Begitu juga pemikiran untuk kembali ke gelanggang politik harus dihapus dari agenda pemikiran NU, sehingga NU bisa lebih konsentrasi untuk menggarap bidang keagamaan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

**C. KATA PENUTUP**  
-----

Puji syukur kepada-MU, ya Allah Azza Wajalla  
Aku telah mereguk nikmat dan ramhmat  
Terima kasih ya Allah  
Samudera maghfirahmu menganga terbuka  
Terima kasih ya Allah  
Lautan ilmu-MU mengalir deras  
Terima kasih ya Allah  
Cahaya ilmu-MU bersinar terang  
Terima kasih ya Allah  
Limpahan rizki-MU melimpah ruah  
Terima kasih ya Allah  
Belas kasih-MU merambah segala suasana  
Terima kasih ya Allah  
Perlindungan-Mu menjaga dari godaan dan malapetaka  
Terima kasih ya Allah  
Ya Rahman .....

Ya Rahim .....

Ya Latief .....

Ya Ghaffar .....

Ya Dzal-jalali Wal-ikrom .....